

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2017)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

MUHAMAD AFFAN FERY UTOMO
B200160031

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2015-2017)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

MUHAMAD AFFAN FERY UTOMO
B 200 160 031

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



(Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si)
NIDN: 0605086301

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA MODAL TAHUN 2015-2017

Oleh:

MUHAMAD AFFAN FERY UTOMO

B 200 160 031

Naskah Publikasi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

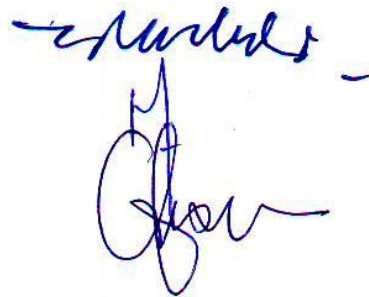
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 04 Juli 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

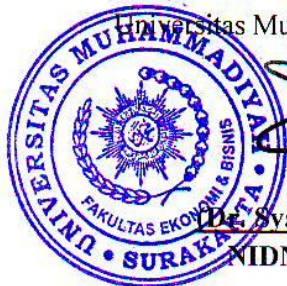
1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Rina Trisnawati., M.Si., Akt., Ph.D
(Anggota Dewan Penguji I)
3. Fauzan, SE, M.Si
(Anggota Dewan Penguji II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Svamsudin, M.M)

NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang penuh diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 Juli 2020

Penulis



MUHAMAD AFFAN FERY UTOMO

B200160031

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2015-
2017)

Abstrak

Otonomi daerah berpengaruh terhadap pemerintah daerah untuk mampu mengelolala keuangan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah kota di Jawa Tengah bertanggung jawab untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan layanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan PDRB terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2015-2017. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menguji pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan PDRB . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi) dan uji hipotesis (uji Regresi Parsial (Uji t), uji Koefisiensi Determinasi (R^2), dan Uji Simultan (Uji Statistik F). hasil penelitian meneunjukkan bahwa PAD memiliki t hitung sebesar 3,935 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H1 diterima sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAU memiliki t hitung sebesar 1,784 dan nilai signifikansi sebesar $0,077 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H2 diterima sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAK memiliki t hitung sebesar 3,317 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H3 diterima sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. PDRB Memiliki t hitung sebesar 4,173 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H4 diterima sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: otonomi daerah, pemerintah daerah, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto.

Abstrak

Otonomi daerah berpengaruh terhadap pemerintah daerah untuk mampu mengelolala keuangan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah kota di Jawa Tengah bertanggung jawab untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan layanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan PDRB terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2015-2017. Jenis penelitian adalah penelitian

kuantitatif, dengan menguji pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan PDRB . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi) dan uji hipotesis (uji Regresi Parsial (Uji t), uji Koefisiensi Determinasi (R^2), dan Uji Simultan (Uji Statistik F). hasil penelitian meneunjukkan bahwa PAD memiliki t hitung sebesar 3,935 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H1 diterima sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAU memiliki t hitung sebesar 1,784 dan nilai signifikansi sebesar $0,077 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H2 diterima sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAK memiliki t hitung sebesar 3,317 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H3 diterima sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. PDRB Memiliki t hitung sebesar 4,173 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H4 diterima sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: otonomi daerah, pemerintah daerah, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto.

1. PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat. Komposisi sektor publik berbeda antarnegara, namun pada umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan dan kesehatan. Sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat. Reformasi sektor publik menimbulkan adanya tuntutan demokratisasi yang menyebabkan aspek transparansi pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif.

Pemberlakuan Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berkonsekuensi terhadap daerah untuk mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pemberlakuan UU diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Otonomi daerah adalah hal

atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya terkandung tiga misi utama yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2009:59).

Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD diartikan sebagai daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD terdiri atas berbagai komponen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan sebagainya serta pengeluaran yang meliputi belanja-belanja. Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja modal. Belanja modal dibiayai dari dana PAD, DAU, DAK dan sebagainya. Namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat.

Hasil penelitian lain menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Arwati dan Hadiati (2013) menyimpulkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Jaya dan Dwiranda (2014) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada belanja modal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Hampir semua negara berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan.

Tujuan pembangunan Negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, material dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia.

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional.

Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat atau belanja pemangunan yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah (Denni Sulistio: 2012). Aset tetap akan memiliki berbagai ciri yang dapat berwujud. Dengan kata lain ciri-ciri belanja modal sifatnya dapat terlihat. Secara lebih jauh, ciri-ciri belanja modal yaitu : berwujud, bermanfaat lebih dari satu periode, bertambah, nilainya relatif material.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan cara memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor yang dianggap produktif. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap (*fixed asset*). Tujuan membangun aset adalah menyediakan fasilitas atau sarana prasana serta infrastruktur untuk menyediakan pelayanan publik yang cukup memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian (Jaya dan Dwirandra 2014). Belanja modal berperan dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam jangka panjang.

2. METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menguji pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan PDRB terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yaitu seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah yang melaporkan secara lengkap realisasi APBD tahun anggaran 2015-2017 Jenis data adalah data sekunder. Sumber data berupa dokumen Laporan Realisasi APBD Pemerintah

Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2015-2017, yaitu realisasi Belanja Modal dan realisasi PAD, DAU, DAK, PDRB yang diperoleh melalui Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka, yang berupa artikel, buku, jurnal, dan catatan untuk laporan historis Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah. Pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*. Variabel dependen berupa Belanja Modal, dan variabel independen meliputi PAD, DAU, DAK, dan PDRB. Widiyanto (2013) mendefinisikan keberadaan variabel dependen adalah dipengaruhi oleh variabel lainnya. Simbol (Y) merupakan simbol untuk variabel terikat dan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa variabel PAD memiliki T_{hitung} sebesar 3,833 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_1 diterima. Dengan demikian PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal itu dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jadi apabila nilai PAD meningkat maka sumber dana yang dimiliki pemerintah daerah akan semakin tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan berinisiatif untuk meningkatkan belanja modalnya guna menambah dan melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Askam Tuasikal (2008) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa variabel DAU memiliki T_{hitung} 1,605 dan nilai signifikansi $0,112 < 0,05$, maka H_2 diterima.

Dengan demikian DAU berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Jadi, semakin tinggi DAU maka Belanja Modal akan semakin meningkat atau sebaliknya apabila terjadi penurunan DAU maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan DAU merupakan dana transfer yang positif tidak signifikan sehingga pemerintah daerah belum tentu dapat memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik. DAU merupakan dana transfer yang tidak bersyarat atau *block grant* sehingga tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana public yang memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Mundiroh (2019) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa variabel DAK memiliki T_{hitung} sebesar 3,514 nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_3 diterima. Dengan demikian, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi DAK maka Belanja Modal akan semakin meningkat, sebaliknya apabila nilai DAK rendah maka Belanja Modal akan menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mendapatkan DAK yang besar maka memiliki Belanja Modal yang besar juga. Hal ini disebabkan karena DAK merupakan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan melengkapi sarana prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Sehingga, DAK akan memengaruhi Belanja Modal dikarenakan DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Made, Ni Putu (2018) yang

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki T_{hitung} sebesar 4,179 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_4 diterima. Dengan demikian, PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PDRB yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah semakin besar pula pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hariani Dwi (2013) yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. PAD memiliki T_{hitung} sebesar 3,833 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H_1 diterima sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. DAU memiliki T_{hitung} sebesar 1,605 dan nilai signifikansi sebesar $0,112 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H_2 diterima sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. DAK memiliki T_{hitung} sebesar 3,514 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H_3 diterima sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap signifikan Belanja Modal. PDRB Memiliki T_{hitung} sebesar 4,179 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian H_4 diterima sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini terbatas pada variabel yang digunakan hanya mencakup pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan produk domestik regional bruto terhadap belanja modal. Hasil akan berbeda jika

peneliti menambah variabel-variabel lain yang terkait. Periode penelitian hanya menggunakan Laporan Realisasi APBD 3 tahun yaitu tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini hanya berpusat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneralisasi secara umum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti 1) penambahan variabel penelitian, 2) perluasan periode laporan realiasi APBD, dan 3) pengembangan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul. 2014. *Makalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Diakses tanggal 13 Februari 2015.
- Arsyad, Liconlin. 2010. *Ekonomi Pembangunan , Edisi 5*. Yogyakarta : STIE YKPNBPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Jawa Tengah Tahun 2008*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015-2017*. Semarang : BPS Jawa Tengah. Indonesia.
- Darise, Nurlan, Drs, A, M.Si (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta. Indeks.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015-2017*. Jawa Tengah. Indonesia.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program SPSS*". Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raha Grafindo.
- Mankiw N.G. 2007. *Makroekonomi*. Edisi keenam, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sabaran, H. 2002. *Produk Domestik Regional Bruto*. Rajawali, Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Versi 11,5 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio Denni. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. Semarang: Unnes. EDAJ 1, Vo. 1, tahun 2012. ISSN 2252-6560.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sunarno, Siswanto. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. Cetakan keenam. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syaiful, 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Cetakan Rineka Cipta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wandira, Arbie. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal. *Accounting Analysis Jurnal* 2 (1) (2013). ISSN 2252-6765.
- Widiyanto. 2013. *Statistika Terapan. Konsep dan Aplikasi Dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikolog dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.